

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 dan 2019**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Nama | : | Sandhy Wijaya |
| | Alamat kantor | : | Grha Pelindo Satu, Gedung B Lantai 2, Jl. Lingkar
Pelabuhan No. 01
Belawan – Medan 20411 |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Jl. Palm Mas II, No. 25 C Medan, Kel. Sunggal Kec.
Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara |
| | Nomor telepon | : | - |
| | Jabatan | : | Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas |
| 2. | Nama | : | Rafdinal |
| | Alamat kantor | : | Grha Pelindo Satu, Gedung B Lantai 2, Jl. Lingkar
Pelabuhan No. 01
Belawan – Medan 20411 |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Perum Grand Diandra Residence, Jl. Cempaka 2 No.
3 RT 003 RW 002 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede
Kota Bekasi, Jawa Barat |
| | Nomor telepon | : | - |
| | Jabatan | : | Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal
Petikemas |

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan;
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 27 Februari 2021

 <u>Sandhy Wijaya</u> Direktur Utama	 <u>Rafdinal</u> Direktur Keuangan dan Umum
---	---

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia

Plaza ASIA, Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340

F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor : 00080/2.1030/AU.1/10/0572-1/1/II/2021

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Prima Terminal Petikemas

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Prima Terminal Petikemas ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Prima Terminal Petikemas tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan PT Prima Terminal Petikemas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 30 Januari 2020 dan telah disajikan kembali tanggal 25 Februari 2021.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**Rusli**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0572

Jakarta, 27 Februari 2021

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	4	55.831.362.633	50.219.215.704
Piutang lain-lain	5	--	314.259.000.000
Pajak dibayar di muka	22	145.392.831.088	128.744.299.568
Biaya dibayar di muka dan uang muka	6	1.847.309.590	464.850.000
Jumlah Aset Lancar		203.071.503.311	493.687.365.272
Aset Tidak Lancar			
Aset takberwujud	7	3.029.249.969.613	2.730.108.557.499
Aset hak-guna	8	1.332.343.107	--
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.030.582.312.720	2.730.108.557.499
JUMLAH ASET		3.233.653.816.031	3.223.795.922.771
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	9	142.309.015.009	674.394.691.768
Biaya yang masih harus dibayar	10	7.542.532.643	1.191.566.247
Utang pajak	22	2.851.719.762	231.170.728
Bagian lancar atas			
utang bank jangka panjang	13	15.122.512.452	--
Utang bunga bank	14	120.530.875.647	79.019.722.155
Liabilitas sewa	11	1.267.767.378	--
Uang titipan	12	49.125.306	135.874.880
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		289.673.548.197	754.973.025.778
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang bank jangka panjang			
setelah di kurangi bagian lancar	13	1.761.307.941.164	1.287.801.129.700
Liabilitas pajak tangguhan	22	16.143.682	--
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.761.324.084.846	1.287.801.129.700
Jumlah Liabilitas		2.050.997.633.043	2.042.774.155.478
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal			
Rp1.000 per saham			
modal ditempatkan dan			
disetor penuh - 1.222.464.000 saham	15	1.222.464.000.000	623.572.000.000
Tambahan modal disetor	15	--	598.892.000.000
Defisit		(39.807.817.012)	(41.442.232.707)
Jumlah Ekuitas		1.182.656.182.988	1.181.021.767.293
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.233.653.816.031	3.223.795.922.771

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
Pendapatan			
Pendapatan konstruksi	16	758.143.856.767	2.228.302.147.910
Jumlah pendapatan		758.143.856.767	2.228.302.147.910
Beban Usaha			
Beban konstruksi	16	(758.143.856.767)	(2.228.302.147.910)
Beban pokok	17	(33.634.396.643)	(12.375.377.473)
Beban pemasaran	18	(54.075.000)	(22.094.071)
Beban umum dan administrasi	19	(4.773.552.174)	(5.298.096.982)
Jumlah Beban Usaha		(796.605.880.584)	(2.245.997.716.436)
Laba (Rugi) Usaha		(38.462.023.817)	(17.695.568.526)
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha			
Pendapatan di luar usaha	20	49.228.393.845	12.111.390.355
Beban di luar usaha	21	(8.722.089.037)	(2.827.776.123)
Jumlah Pendapatan (Beban) di Luar Usaha		40.506.304.808	9.283.614.232
Laba (Rugi) Sebelum pajak		2.044.280.991	(8.411.954.294)
(Beban) Penghasilan Pajak			
Pajak kini	22	(393.721.614)	--
Pajak tangguhan	22	(16.143.682)	(12.383.117.397)
Laba (Rugi) Setelah Pajak		1.634.415.695	(20.795.071.691)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		1.634.415.695	(20.795.071.691)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp	Tambahan Modal disetor Rp	Saldo laba (rugi) dan Penghasilan komprehensif lain Rp	Jumlah Ekuitas Rp
Saldo 1 Januari 2019		623.572.000.000	334.892.000.000	(20.647.161.016)	937.816.838.984
Tambahan modal disetor	15	--	264.000.000.000	--	264.000.000.000
Rugi komprehensif tahun berjalan		--	--	(20.795.071.691)	(20.795.071.691)
Saldo 31 Desember 2019		623.572.000.000	598.892.000.000	(41.442.232.707)	1.181.021.767.293
Tambahan modal disetor	15	598.892.000.000	(598.892.000.000)	--	--
Laba komprehensif tahun berjalan		--	--	1.634.415.695	1.634.415.695
Saldo 31 Desember 2020		1.222.464.000.000	--	(39.807.817.012)	1.182.656.182.988

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2020 Rp	2019 Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembayaran kas ke pemasok	(547.839.782.780)	(12.409.890.157)
Pembayaran kas ke karyawan	(14.194.824.548)	(9.439.732.234)
Pembayaran pajak penghasilan	(14.421.704.100)	(53.882.618.437)
Pendapatan bunga	2.434.227.885	--
Pembayaran uang muka	(68.500.000)	--
Penerimaan uang muka	--	31.172.863.294
Penerimaan uang titipan	--	123.223.861
Penerimaan kas dari pihak ketiga	--	380.786.753.066
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(574.090.583.543)	336.350.599.393
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penambahan aset takberwujud	(250.623.222.784)	(1.428.622.213.942)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(250.623.222.784)	(1.428.622.213.942)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penambahan pinjaman bank	525.297.473.716	670.801.129.700
Penambahan setoran modal	314.259.000.000	284.633.000.000
Pembayaran pokok pinjaman bank	(9.230.520.460)	--
Penambahan utang bunga pinjaman	--	53.689.546.156
Kas bersih dihasilkan dari aktivitas pendanaan	830.325.953.256	1.009.123.675.856
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	5.612.146.929	(83.147.938.693)
Kas dan setara kas awal tahun	50.219.215.704	133.367.154.397
Kas dan setara kas akhir tahun	55.831.362.633	50.219.215.704

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Prima Terminal Petikemas ("Perusahaan"), didirikan berdasarkan Akta No. 162 tanggal 30 Juli 2013, dari Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 03 September 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir kali diubah melalui Akta No. 36 tanggal 30 Juli 2020 dari Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, tentang pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0065206.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 22 September 2020.

PT Prima Terminal Petikemas akan mengembangkan dan mengoperasikan Terminal Petikemas Belawan sepanjang 350 meter atau yang disebut Pengembangan Terminal Petikemas Belawan Fase II. Infrastruktur Terminal Petikemas Belawan Fase I sepanjang 350 meter dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pengembangan Fase I dan II dengan panjang keseluruhan 700 meter sejalan dengan Rencana Induk Pelabuhan Belawan yang telah disahkan oleh Menteri Perhubungan No. PM 21 tahun 2012.

PT Prima Terminal Petikemas mulai melaksanakan pekerjaan sipil pada tahun 2014 yang diawali dengan penyiapan *detailed engineering design* dan proses pelelangan. Keseluruhan penyiapan aktivitas pekerjaan sehingga terwujudnya pembangunan terminal petikemas beserta kelengkapannya dibagi atas beberapa paket pekerjaan, dan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, pekerjaan-pekerjaan sipil masih berlangsung.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing 31 karyawan dan 27 karyawan.

b. Bidang Usaha

Berdasarkan perubahan atas akta pendirian Perusahaan Pasal 3, maksud dan tujuan Perusahaan adalah membangun dan mengoperasikan pelabuhan beserta fasilitas pendukungnya dan menyediakan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang jasa terkait dengan kepelabuhan.

c. Dewan Komisaris dan Direksi

Pengangkatan dan penetapan susunan dewan komisaris dan direksi terakhir diubah berdasarkan Akta No. 33 tanggal 19 November 2020 dari Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0208090.AH.01.11. tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020. Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Komisaris Utama	Prasetyo	Mohamad Nur Sodik
Komisaris	Ir. Yuliandi, M.M.	Anis Anjayani
Komisaris	Ir. Adhyasa Yutono	Ir. Adhyasa Yutono
Direktur Utama	Sandhy Wijaya, S.E.	Ridwan Sani Siregar
Direktur Keuangan dan Umum	Mokhtar	Ekwan Hadyanto
Direktur Operasi dan Teknik	Agus Wilarso	Agus Wilarso

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam rangka menyusun laporan keuangan Perusahaan:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp), sebagai dasar penyusunan laporan keuangan merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut ini adalah penerapan dari PSAK dan ISAK baru dan revisi yang relevan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 15 (Amandemen 2017) : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 1 (Amandemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan;
- PSAK 25 (Amandemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah;
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Perusahaan menerapkan PSAK 73 “Sewa” secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan mengakui efek kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba untuk PSAK 73.

PSAK 71 “Instrumen Keuangan”

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Perusahaan pada awal penerapan PSAK 71.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Sesuai ketentuan transisi PSAK 71 terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan, Perusahaan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif atas penyesuaian nilai tercatat pada awal penerapan diakui pada saldo laba pada 1 Januari 2020 sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi dalam standar.

Berdasarkan dari penilaian Perusahaan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara implementasi PSAK 71 dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebelumnya.

Perusahaan melakukan penerapan atas PSAK 71 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: “Pendapatan” dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Perusahaan terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: “Sewa” yang mensyaratkan Perusahaan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah.

Perusahaan menerapkan PSAK 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali periode komparatif sebagaimana diizinkan oleh ketentuan transisi khusus dalam standar.

Untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, Perusahaan mengakui nilai tercatat aset sewa dan liabilitas sewa segera sebelum transisi sebagai nilai tercatat dari aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal penerapan awal.

Pada saat penerapan PSAK 73, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai “sewa operasi” berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30 “Sewa”.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 8,5%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diperkenankan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- akuntansi sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa alternatif kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Dampak penerapan awal PSAK 73 terhadap saldo awal 1 Januari 2020 untuk aset hak-guna sebesar Rp 1.200.335.691 dan liabilitas sewa sebesar Rp 1.200.335.691.

Perusahaan telah memilih untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak pada tanggal penerapan awal untuk kontrak yang telah ada sebelum tanggal transisi yang dimana Perusahaan telah menggunakan penilaian yang dibuat sesuai dengan PSAK 30 "Sewa" dan ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa".

d. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amandemen): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis.

e. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan selanjutnya

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

f. Instrumen Keuangan

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan dan menerbitkan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran selanjutnya aset keuangan perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan Perusahaan dan diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti objektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan terdampak.

Perusahaan mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman, dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Perusahaan mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. nilai waktu uang; dan
- iii. informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Pengakuan Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- i. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untuk dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- ii. Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Reklasifikasi

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat, atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan ketika Perusahaan mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Ketika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Perusahaan melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan penyelesaian liabilitasnya secara simultan.

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi;
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
 - (viii) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam Catatan 23.

Semua transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar yang dapat dibuktikan diantaranya dengan pemerolehan kontrak dilakukan setara, yaitu melalui tender, harga jual yang tercermin dalam nilai kontrak diperlakukan setara.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

i. Piutang Usaha dan Piutang Di Luar Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar. Piutang di luar usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perusahaan.

Piutang usaha dan piutang di luar usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang di luar usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dan disajikan dalam "beban penurunan nilai". Ketika piutang usaha dan piutang di luar usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "beban penurunan nilai" pada laporan laba rugi komprehensif.

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka adalah pengeluaran-pengeluaran yang telah terjadi namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode di saat manfaatnya diterima. Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan yang mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sesuai dengan PSAK 16, Perusahaan memilih metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat dikurangi nilai residunya.

Pengelompokan umur ekonomis dan persentase penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis	Penyusutan
Instalasi fasilitas pelabuhan	10 - 25 Tahun	4% - 10%
Kendaraan	5 Tahun	20%
Peralatan	4 Tahun	20%

Nilai residu aset tetap dikaji ulang, dan telah disesuaikan pada setiap tanggal laporan keuangan. Biaya perbaikan dan perawatan aset untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai, kegunaan, dan masa manfaat dalam jumlah besar dikapitalisasi.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penyempurnaan yang menambah nilai, kegunaan dan masa manfaat dalam jumlah besar dikapitalisasi aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari estimasi atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

l. Aset Dalam Penyelesaian

Aset dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi. Aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

m. Hak Pengusahaan Pelabuhan Terminal Petikemas

Perusahaan telah menerapkan ISAK 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa Pengungkapan”.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Perusahaan membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengusahaan Pelabuhan Terminal Petikemas Belawan Fase II, yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian Pelabuhan Terminal Petikemas Belawan Fase II. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan/ Pemerintah.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010): Kontrak Konstruksi dan pendapatan perusahaan pelabuhan sesuai dengan PSAK 23: Pendapatan. Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi dan pendapatan perusahaan pelabuhan sesuai dengan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Ketika Perusahaan menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima oleh Perusahaan diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan pelabuhan terminal petikemas atau peningkatan kapasitas Pelabuhan yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan pelabuhan terminal petikemas, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Perusahaan mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Perusahaan menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Perusahaan mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya. Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya perolehan meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset bersangkutan.

Seluruh aset yang diklasifikasikan sebagai aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasikan. Jumlah yang dapat disusutkan aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Amortisasi atas aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas menggunakan metode garis lurus. Metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan. Nilai residu aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang, dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan, pada setiap tanggal pelaporan. Umur manfaat untuk setiap aset takberwujud dengan umur manfaat 2, 5 dan 10 tahun.

Nilai tercatat suatu aset takberwujud diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan aset takberwujud bersangkutan, jika nilai tercatat aset takberwujud tersebut lebih besar daripada nilai terpulihkannya. Penurunan nilai aset takberwujud diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada pos "Pendapatan/ (Beban) Lain-lain-Bersih". Aset takberwujud yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomi manfaat depan atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset takberwujud berikut akumulasi amortisasinya.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai "Rugi Penurunan Nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia. Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu (*valuation multiples*) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

p. Aset Hak-Guna dan Utang Sewa

Perlakuan akuntansi sebelum penerapan PSAK 73 “Sewa”

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa

Sebelum penerapan PSAK 73 “Sewa”, Perusahaan menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011) “Sewa” dan ISAK 16 “Perjanjian Konsesi Jasa”.

Berdasarkan PSAK 30, sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran atas sewa pembiayaan harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari utang sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo utang. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Sedangkan pembayaran atas sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari pesewa) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Klasifikasi Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Perlakuan akuntansi setelah penerapan PSAK 73 “Sewa”

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasi, Perusahaan menilai apakah:

Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasi – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi:

- a. Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- b. Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Perusahaan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepisi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Perusahaan cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Perusahaan mengakui aset hak-guna dan utang sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari utang sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset hak-guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap (Catatan 2k).

Utang sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan dan entitas anak. Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Setelah pengakuan awal utang sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Utang sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika utang sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Perusahaan menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah berdasarkan sewa-per-sewa.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah yang ditetapkan oleh Perusahaan.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan usaha diakui pada saat kegiatan pelayanan jasa telah selesai dilakukan (*accrual basis*). Kegiatan jasa pelayanan yang telah selesai dilakukan sampai dengan akhir periode yang belum diterbitkan nota tagihannya dicatat sebagai pendapatan yang masih akan diterima.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

r. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung) yang terjadi sehubungan dengan pinjaman dana.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah seluruh biaya pinjaman, bunga, diskonto, biaya-biaya lain yang terkait, selisih kurs dari pinjaman yang tidak dilakukan *hedging* yang timbul selama peminjaman dana tersebut dikurangi dengan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman yang belum digunakan. Konstruksi yang termasuk dalam perolehan aset tertentu adalah proyek-proyek *pre-financing* yang pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan (jika ada) juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima, atau jika Perusahaan mengajukan keberatan pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

t. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal perolehan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Nilai tukar untuk 1 (satu) Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia masing-masing yaitu sebesar Rp14.105 dan Rp13.901.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi, tidak terdapat pertimbangan kritis yang mempunyai efek signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari yang sudah dijelaskan di bawah ini.

a. Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan atau aset takberwujud. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dalam menjalankan wewenangannya, sesuai dengan perjanjian konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 2m).

Pada akhir masa konsesi jasa, Perusahaan harus menyerahkan pelabuhan terminal petikemas kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk tanah, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian Terminal Pelabuhan Petikemas Belawan Fase II.

Perusahaan berpendapat bahwa perjanjian konsesi jasa memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19: "Aset Takberwujud".

Perusahaan diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp758.143.856.767 dan Rp2.228.302.147.910.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi dan biaya konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010): Kontrak Konstruksi. Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi dan pendapatan perusahaan pelabuhan sesuai dengan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Perusahaan mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi dengan menggunakan metode biaya dengan margin nol berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu pada saat penentuan tarif awal pelabuhan terminal petikemas sebelum pelabuhan terminal petikemas dioperasikan.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

a. Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

b. Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

c. Penentuan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 3 tahun sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset. Manajemen Perusahaan tidak melakukan perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan evaluasi terkini.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari kas, rekening bank dan deposito berjangka pada 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Kas	70.644.820	5.743.900
Bank		
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.654.737.629	428.160.058
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.920.336.200	931.401.843
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	851.994.996	23.138.568
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	528.926.439	511.147.316
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	112.842.843	188.607.958
Jumlah pihak berelasi - Rupiah	<u>13.068.838.107</u>	<u>2.082.455.743</u>
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<u>27.691.879.706</u>	<u>37.931.016.061</u>
Jumlah bank - pihak berelasi	<u>40.760.717.813</u>	<u>40.013.471.804</u>
Deposito berjangka		
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.000.000.000	4.200.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	--	1.000.000.000
Jumlah deposito berjangka - pihak berelasi	<u>15.000.000.000</u>	<u>10.200.000.000</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>55.831.362.633</u>	<u>50.219.215.704</u>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun		
Rupiah	3,00% - 4,00%	5,50% - 8,25%
Jangka Waktu	1 Bulan	1 Bulan

5. PIUTANG LAIN-LAIN

	2020	2019
	Rp	Rp
Pihak berelasi		
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	--	184.800.000.000
PT Utama Karya (Persero)	--	89.834.000.000
PT Wijaya Karya (Persero)	--	39.600.000.000
Jumlah pihak berelasi	<u>--</u>	<u>314.234.000.000</u>
Pihak ketiga		
Lain-lain	<u>--</u>	<u>25.000.000</u>
Jumlah piutang pihak ketiga	<u>--</u>	<u>25.000.000</u>
Jumlah piutang lain-lain	<u>--</u>	<u>314.259.000.000</u>

Mutasi pada tahun 2020 terutama merupakan reklasifikasi piutang lain-lain pihak berelasi ke akun tambahan modal disetor penuh.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

	2020 Rp	2019 Rp
Biaya asuransi fasilitas pelabuhan	1.643.734.590	--
Uang muka kegiatan usaha lainnya	68.500.000	--
Biaya sewa jalan dan bangunan	--	33.300.000
Biaya umum lainnya	135.075.000	431.550.000
Jumlah biaya dibayar di muka dan uang muka	1.847.309.590	464.850.000

7. ASET TAKBERWUJUD

	2020				
	Saldo awal 1 Januari 2020 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo akhir 31 Desember 2020 Rp
Biaya perolehan					
<u>Aset takberwujud - Hak Konsesi</u>					
Hak Konsesi - Terminal Petikemas Belawan Fase II	2.228.302.147.910	--	--	(2.228.302.147.910)	--
<u>Aset takberwujud dalam penyelesaian</u>					
Konstruksi - Terminal Petikemas Belawan Fase II	501.663.379.589	3.102.686.958	--	2.524.110.203.066	3.028.876.269.613
<u>Aset takberwujud lainnya</u>					
Pendidikan fasilitas & sarana	143.030.000	--	--	--	143.030.000
Sertifikasi fasilitas & sarana	--	230.670.000	--	--	230.670.000
Pendirian, dan atas perubahan anggaran dasar	986.096.932	--	--	--	986.096.932
Jumlah biaya perolehan	2.731.094.654.431	3.333.356.958	--	2.524.110.203.066	3.030.236.066.545
Akumulasi amortisasi					
<u>Aset takberwujud - Hak Konsesi</u>					
Hak Konsesi - Terminal Petikemas Belawan Fase II	--	--	--	--	--
<u>Aset takberwujud lainnya</u>					
Pendidikan fasilitas & sarana	--	--	--	--	--
Pendirian & perubahan anggaran dasar	986.096.932	--	--	--	986.096.932
Jumlah akumulasi amortisasi	986.096.932	--	--	--	986.096.932
Jumlah tercatat	2.730.108.557.499	3.333.356.958	--	2.524.110.203.066	3.029.249.969.613

	2019				
	Saldo awal 1 Januari 2019 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo akhir 31 Desember 2019 Rp
Biaya perolehan					
<u>Aset takberwujud - Hak Konsesi</u>					
Hak Konsesi - Terminal Petikemas Belawan Fase II	513.698.610.231	--	--	1.714.603.537.679	2.228.302.147.910
<u>Aset takberwujud dalam penyelesaian</u>					
Konstruksi - Terminal Petikemas Belawan Fase II	787.787.733.326	--	--	(286.124.353.737)	501.663.379.589
<u>Aset takberwujud lainnya</u>					
Pendidikan fasilitas & sarana	--	143.030.000	--	--	143.030.000
Sertifikasi fasilitas & sarana	--	--	--	--	--
Pendirian, dan atas perubahan anggaran dasar	986.096.932	--	--	--	986.096.932
Jumlah biaya perolehan	788.773.830.258	143.030.000	--	1.428.479.183.942	2.731.094.654.431
Akumulasi amortisasi					
<u>Aset takberwujud - Hak Konsesi</u>					
Hak Konsesi - Terminal Petikemas Belawan Fase II	--	--	--	--	--
<u>Aset takberwujud lainnya</u>					
Pendidikan fasilitas & sarana	--	--	--	--	--
Pendirian & perubahan anggaran dasar	986.096.932	--	--	--	986.096.932
Jumlah akumulasi amortisasi	986.096.932	--	--	--	986.096.932
Jumlah tercatat	787.787.733.326	143.030.000	--	1.428.479.183.942	2.730.108.557.499

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia/ Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas Belawan Fase II.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing masing persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal Petikemas Belawan Fase II masih dalam konstruksi sebesar 100% dan 85.06%.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal Petikemas Belawan Fase II untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp120.530.875.647 dan Rp79.019.722.155 (Catatan 14).

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada tahun 31 Desember 2020, Perusahaan telah mengasuransikan aset takberwujud hak konsesi terhadap risiko kehilangan dan kerusakan fisik terhadap peralatan fasilitas pelabuhan hingga bangunan fasilitas pelabuhan.

Bangunan Fasilitas Pelabuhan Petikemas Belawan Fase II telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap risiko kehilangan dan kerusakan fisik terhadap peralatan fasilitas pelabuhan hingga bangunan fasilitas pelabuhan, dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.494.105.858.599.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

8. ASET HAK-GUNA

	2020				
	Saldo awal 1 Januari 2020 Rp	Dampak PSAK 73 Rp	Saldo awal yang disesuaikan 1 Januari 2020 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp
Harga perolehan					
Kendaraan	--	1.200.335.691	1.200.335.691	--	--
Bangunan	--	961.869.894	961.869.894	--	--
Jumlah	--	1.200.335.691	1.200.335.691	--	--
Akumulasi penyusutan					
Kendaraan	--	--	--	589.395.255	--
Bangunan	--	--	--	240.467.223	--
Jumlah	--	--	--	829.862.478	--
Nilai Buku	--				1.332.343.107

9. UTANG USAHA

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak berelasi		
PT Wika - HK Joint Operation	85.265.814.284	136.181.498.900
PT Virama Karya (Persero)	--	1.260.259.496
PT Sucofindo (Persero)	939.232.938	--
PT Prima Multi Peralatan	328.288.950	--
PT Prima Pengembangan Kawasan	320.357.510	288.906.042
Jumlah pihak berelasi	86.853.693.682	137.730.664.438
Pihak ketiga		
Mitsui E&S Machinery Co. Ltd	24.483.467.679	221.835.240.000
Konecranes Finland Corporation	19.888.057.050	200.220.000.000
PT Primus Indonesia	6.637.110.103	111.640.189.430
Terberg	2.073.435.735	2.087.400.000
PT Atria Swacipta Rekayasa	720.335.000	720.335.000
CV Arya Guna Jaya	565.605.260	--
CV Sensorlink Yumitaro Indonesia	579.892.500	--
CV Putera Gemilang	277.000.000	--
CV Rajka Persada	138.150.000	--
PT Nawakara Perkasa Nusantara	92.268.000	--
PT Esc Environment Indonesia	--	131.987.900
PT Infrastructure Week Asia	--	28.875.000
Jumlah pihak ketiga	55.455.321.327	536.664.027.330
Jumlah utang usaha	142.309.015.009	674.394.691.768

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2020 Rp	2019 Rp
Beban pegawai	4.108.378.123	670.440.702
Beban bunga	3.102.686.958	--
Beban sewa	229.212.863	62.177.190
Beban lainnya	102.254.699	458.948.355
Jumlah biaya yang masih harus dibayar	7.542.532.643	1.191.566.247

Beban lainnya terutama merupakan pembayaran untuk pendidikan dan latihan, asuransi, kesehatan, dan bahan peralatan.

11. LIABILITAS SEWA

	2020 Rp	2019 Rp
Sewa kendaraan	635.898.484	--
Sewa bangunan	631.868.894	--
Jumlah liabilitas sewa	1.267.767.378	--

12. UANG TITIPAN

	2020 Rp	2019 Rp
Iuran pensiun	10.629.579	9.541.393
Jiwasraya	--	1.121.760
Lainnya	38.495.727	125.211.727
Jumlah uang titipan	49.125.306	135.874.880

13. UTANG BANK

	2020 Rp	2019 Rp
Rupiah		
Utang kredit investasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	997.951.200.000	1.000.000.000.000
Dolar Amerika Serikat		
Utang sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	389.239.626.808	143.900.564.850
Utang sindikasi PT Indonesia Infrastructure Finance	389.239.626.808	143.900.564.850
Jumlah utang bank	1.776.430.453.616	1.287.801.129.700
Dikurangi bagian lancar	(15.122.512.452)	--
Jumlah utang bank jangka panjang	1.761.307.941.164	1.287.801.129.700

a. Fasilitas Kredit Investasi (KI) 1 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 48 tanggal 29 September 2015, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui pemberian fasilitas kredit investasi efektif dan kredit investasi *interest during construction* sebesar Rp1.152.000.000.000.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jangka waktu fasilitas adalah 15 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi termasuk masa tenggang pembayaran angsuran pokok selama 3 tahun 6 bulan. Perjanjian Kredit Investasi ditandatangani pada tanggal 29 September 2015. Kredit Investasi tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur Terminal Petikemas Belawan Fase II. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas kredit investasi adalah sebesar ketentuan Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR) 3 bulan ditambah 3,35% p.a.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut antara lain:

- 1) Tanah, bangunan dermaga dan *container yard* serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Petikemas Belawan Fase II yang berada pada lahan atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan diikat dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit fasilitas kredit;
- 2) Seluruh hasil klaim atas garansi proyek pembangunan infrastruktur Dermaga dan Terminal Petikemas Belawan Fase II yang diterima dari kontraktor/atau *supplier*; dan
- 3) Seluruh hasil klaim asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur Dermaga dan Terminal Petikemas Belawan Fase II.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memindahtangankan dan/atau mengalihkan barang agunan;
- 2) Mengikatkan diri dalam kredit, sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali dapat memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan dalam perjanjian;
- 3) Pembagian dividen;
- 4) Membayar atau melunasi utang kepada pemegang saham kecuali utang piutang yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan;
- 5) Mengubah susunan pemegang saham yang menyebabkan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjadi minoritas dan atau bukan sebagai pemegang saham pengendali Perusahaan.

Selanjutnya, Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 48 tanggal 29 September 2015 mengalami perubahan sesuai dengan Akta Addendum V atas Perjanjian Kredit Investasi No. OPT.WCO/CCL.453/ADD/2020 tanggal 23 Juni 2020, dimana bank menyetujui permohonan Perusahaan terkait syarat efektif fasilitas kredit dan perubahan agunan.

b. Fasilitas Kredit Investasi (KI) 2 dari Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 13 tanggal 31 Agustus 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") menyetujui pemberian fasilitas kredit investasi sindikasi, pinjaman non tunai dalam bentuk *Letter of Credit* ("LC") atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan fasilitas pembiayaan bunga selama masa konstruksi *Interest During Construction* ("IDC") sebesar USD142.758.000. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai agen fasilitas dan agen jaminan dan agen penampungan di dalam perjanjian kredit. Fasilitas kreditnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit investasi sebesar USD70.174.000;
- 2) Kredit *Non Cash Loan* ("NCL") sebesar USD70.174.000;
- 3) Kredit bunga selama masa konstruksi ("IDC") sebesar USD2.410.000;
- 4) Kredit Investasi, NCL, IDC digunakan untuk pengadaan alat fasilitas pelabuhan dan pembayaran konsultan pengawas pengadaan.

Fasilitas-fasilitas tersebut dikenakan tingkat bunga pada setiap pinjaman untuk setiap periode bunga dengan ketentuan:

- 1) 5% per tahun; atau
- 2) Tingkat presentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari yang berlaku dari:
 - i. Marjin; dan
 - ii. Libor beberapa bulan.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut antara lain:

- 1) Fidusia atas hasil klaim / *proceed* atas jaminan pembayaran (*bank guarantee*) atau *Standby Letter of Credit* ("SBLC"), dan / atau asuransi atas proyek.
- 2) Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas Belawan *International Container Terminal* ("BICT") Fase II atas nama PT Prima Terminal Petikemas yang dibiayai oleh kreditur sindikasi.
- 3) Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan *banker's clause* dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai bertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi.
- 4) Seluruh rekening yang akan dibentuk sehubungan dengan proyek, disertai dengan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) untuk melakukan pendebitan atas saldo yang terdapat dalam rekening-rekening tersebut dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku ("Gadai Rekening Penampungan").
- 5) *Letter of Undertaking* dari pemegang saham yang menjamin kepastian penyelesaian atas kewajiban yang timbul atas perjanjian kredit dengan para kreditur termasuk *cost overrun* yang timbul.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memindahtangankan dan mengalihkan barang agunan.
- 2) Mengikatkan diri dalam hubungan kredit atau menerima pinjaman, mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali dalam hal Perusahaan dapat memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit, maka cukup pemberitahuan saja, dimana pemberitahuannya harus disampaikan kepada kreditur sindikasi selambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan tindakan Perusahaan tersebut.
- 3) Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.
- 4) Membayar dan melunasi utang kepada pemegang saham kecuali utang piutang yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan.
- 5) Mengubah susunan pemegang saham yang menyebabkan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjadi minoritas atau bukan sebagai pemegang saham pengendali Perusahaan.
- 6) Mengadakan penyertaan pada perusahaan lain, merger atau akuisisi.

14. UTANG BUNGA BANK

	2020 Rp	2019 Rp
Rupiah		
Utang kredit investasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	104.977.832.761	75.917.777.963
Dolar Amerika Serikat		
Utang sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.776.521.443	1.550.972.096
Utang sindikasi PT Indonesia Infrastructure Finance	7.776.521.443	1.550.972.096
Jumlah utang bunga bank	120.530.875.647	79.019.722.155

15. MODAL SAHAM

	2020	
	Presentase kepemilikan	Lembar saham
		Nominal
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	70%	855.724.000
PT Wijaya Karya (Persero)	15%	183.370.000
PT Hutama Karya (Persero)	15%	183.370.000
Jumlah	100%	1.222.464.000

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2019		
	Presentase kepemilikan	Lembar saham	Nominal
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	70%	436.500.000	436.500.000.000
PT Wijaya Karya (Persero)	15%	93.536.000	93.536.000.000
PT Hutama Karya (Persero)	15%	93.536.000	93.536.000.000
Jumlah	100%	623.572.000	623.572.000.000

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 04 Juni 2020 dari Henry Tjong, SH., Notaris di Medan, bahwa saham Perusahaan yang telah disetor dan ditempatkan berjumlah Rp623.572.000.000. Berdasarkan Keputusan Sirkuler, para Pemegang Saham Perusahaan dengan bulat memutuskan dan menyetujui melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp958.464.000.000 dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar dan modal ditempatkan/ disetor sebesar Rp334.892.000.000 dengan nominal sebesar Rp1.000 per lembar.

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 30 Juli 2020 dari Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, para pemegang saham Perusahaan dengan bulat memutuskan dan menyetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp4.500.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar dan modal ditempatkan/ disetor sebesar Rp264.000.000.000 dengan nominal saham Rp1.000 per lembar, sehingga modal disetor semula sebesar Rp958.464.000.000 menjadi sebesar Rp1.222.464.000.000.

16. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan pelabuhan terminal petikemas dan peningkatan kapasitas terminal petikemas. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tambahan tanpa margin tertentu.

17. BEBAN POKOK

	2020 Rp	2019 Rp
Imbalan kerja	10.421.564.814	5.391.371.101
Asuransi terminal petikemas	8.218.672.965	119.496.508
Bahan pokok	7.559.870.451	476.768.319
Sewa	3.043.169.665	1.650.904.330
Pemeliharaan	842.547.500	34.147.536
Perjalanan dinas	835.599.925	1.730.724.984
Amortisasi aset hak-guna	829.862.478	--
Diklat dan sertifikasi	300.450.000	41.933.265
Kesehatan	122.889.901	235.045.805
Administrasi perkantoran	96.224.934	351.430.148
Lainnya	1.363.544.010	2.343.555.477
Jumlah beban pokok	33.634.396.643	12.375.377.473

Beban pokok lainnya terutama merupakan beban atas jamuan rapat, rumah tangga, olahraga dan kesehatan.

18. BEBAN PEMASARAN

Beban pemasaran merupakan beban promosi dan periklanan yaitu sebesar Rp54.075.000 dan Rp22.094.071 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2020 Rp	2019 Rp
Direksi, Komisaris dan perangkat kerja lainnya	4.373.252.174	4.842.028.209
Jasa konsultan dan audit	400.300.000	456.068.773
Jumlah beban umum dan administrasi	4.773.552.174	5.298.096.982

20. PENDAPATAN DI LUAR USAHA

	2020 Rp	2019 Rp
Laba selisih kurs	46.794.165.960	3.074.742.201
Pendapatan bunga deposito	1.863.919.087	8.335.156.079
Pendapatan jasa giro	570.308.798	701.492.075
Jumlah pendapatan di luar usaha	49.228.393.845	12.111.390.355

21. BEBAN DI LUAR USAHA

	2020 Rp	2019 Rp
Rugi selisih kurs	8.526.716.128	2.684.192.575
Beban pajak (final) jasa giro dan deposito	118.566.680	140.295.816
Beban bunga hak aset guna	73.122.794	--
Biaya administrasi bank	3.418.233	3.002.401
Beban di luar usaha lainnya	265.202	285.331
Jumlah beban di luar usaha	8.722.089.037	2.827.776.123

22. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Akun ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat dikreditkan pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp145.392.831.088 dan Rp128.744.299.568.

b. Utang Pajak

	2020 Rp	2019 Rp
PPh Pasal 21	254.214.479	113.875.393
PPh Pasal 23	3.475.321	433.025
PPh Pasal 4 (2)	2.200.393.497	116.862.310
PPh Pasal 29	393.636.465	--
Jumlah utang pajak	2.851.719.762	231.170.728

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

c. Pajak Penghasilan

	2020 Rp	2019 Rp
Laba/ (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.044.280.991	(8.411.954.294)
Beda tetap:		
Pendapatan bunga deposito (sebelum PPh final)	(1.863.919.087)	(8.335.156.079)
Pendapatan jasa giro	(570.308.493)	(701.481.779)
Tunjangan PPh Pasal 21	1.089.272.726	276.208.739
Bahan bakar minyak (BBM) kendaraan	40.899.147	44.905.026
Bahan makanan	405.222.550	203.664.710
Asuransi (kapal & pasar kepelabuhanan)	--	119.496.508
Amortisasi aset hak guna	64.574.728	--
Sewa	--	1.064.000
Administrasi kantor surat kabar, majalah, buletin & buku	639.000	2.475.000
Jamuan rapat	209.735.481	273.873.195
Perjalanan dinas	250.679.978	519.217.495
Biaya di luar operasi	118.566.680	784.049.281
Taksiran penghasilan kena pajak	(254.637.291)	(6.811.683.904)
Laba (rugi) setelah fiskal	1.789.643.700	(15.223.638.198)
Beban pajak penghasilan		
Pajak Kini	(393.721.614)	--
Jumlah beban pajak penghasilan	(393.721.614)	--
Dikurangi:		
PPh Pasal 22	--	--
PPh Pasal 23	--	--
PPh Pasal 25	--	--
Jumlah kredit pajak	--	--

d. Pajak Tangguhan

	2020 Rp	2019 Rp
Liabilitas pajak tangguhan atas aset hak guna	16.143.682	--
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	16.143.682	--

23. PIHAK BERELASI

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat transaksi
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Entitas pemegang saham Perusahaan	Setoran modal
PT Wijaya Karya (Persero)	Entitas pemegang saham Perusahaan	Setoran modal
PT Hutama Karya (Persero)	Entitas pemegang saham Perusahaan	Setoran modal
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia	Kas dan setara kas
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk.	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia	Kas dan setara kas
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia	Kas dan setara kas
		Utang bank

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pihak-pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat transaksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia	Kas dan setara kas
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Pengendalian melalui Pemerintah Daerah	Kas dan setara kas
PT Wika - HK <i>Joint Operation</i>	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia	Utang usaha
PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia	Utang usaha
PT Prima Multi Peralatan	Entitas sepengendali	Utang usaha
PT Prima Pengembangan Kawasan	Entitas sepengendali	Utang usaha

Saldo dan transaksinya dengan pihak berelasi:

	Notes	2020		2019	
		Rp	% *)	Rp	% *)
Kas dan setara kas					
Bank	4				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		37.346.617.335	1,15	38.359.176.119	1,19
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		1.920.336.200	0,06	931.401.843	0,03
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		851.994.996	0,03	23.138.568	0,00
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk.		528.926.439	0,02	511.147.316	0,02
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara		112.842.843	0,00	188.607.958	0,01
Jumlah bank		40.760.717.813	1,26	40.013.471.804	1,24
Piutang lain lain					
Deposito					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		8.000.000.000	0,25	5.000.000.000	0,16
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		7.000.000.000	0,22	4.200.000.000	0,13
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara		--	0,00	1.000.000.000	0,03
Jumlah deposito		15.000.000.000	0,46	10.200.000.000	0,32
Jumlah		55.760.717.813	1,72	50.213.471.804	1,56
Piutang lain-lain	5				
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)		--	0,00	184.800.000.000	5,73
PT Wijaya Karya (Persero)		--	0,00	89.834.000.000	2,79
PT Hutama Karya (Persero)		--	0,00	39.600.000.000	1,23
Jumlah		--	0,00	314.234.000.000	9,75
Utang usaha	9				
PT Wika - HK <i>Joint Operation</i>		85.265.814.284	4,16	136.181.498.900	6,67
PT Virama Karya (Persero) Tbk		--	0,00	1.260.259.496	0,06
PT Sucofindo (Persero)		939.232.938	0,05	288.906.042	0,01
PT Prima Multi Peralatan		328.288.950	0,02	--	0,00
PT Prima Pengembangan Kawasan		320.357.510	0,02	--	0,00
Jumlah		86.853.693.682	4,23	137.730.664.438	6,74
Utang Bank	13				
Utang kredit investasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		997.951.200.000	48,66	1.000.000.000.000	48,95
Utang sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		389.239.626.808	18,98	143.900.564.850	7,04
Jumlah		1.387.190.826.808	67,63	1.143.900.564.850	56,00
Utang bunga bank	14				
Utang kredit investasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		104.977.832.761	5,12	75.917.777.963	3,72
Utang sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		7.776.521.443	0,38	1.550.972.096	0,08
Jumlah		112.754.354.204	5,50	77.468.750.059	3,79

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

24. TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Liabilitas keuangan pokok Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang bank, utang bunga bank, dan utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Perusahaan. Perusahaan juga memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, piutang lain-lain, dari kegiatan usahanya.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Pentingnya pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas baik di Indonesia dan pasar keuangan internasional. Manajemen Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko sebagai berikut:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar valuta asing, dan harga pasar lainnya akan mempengaruhi pendapatan Perusahaan atau nilai kepemilikan atas instrumen keuangan.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa salah satu pihak untuk suatu instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan akan mengakibatkan kerugian keuangan kepada pihak lain.

Perusahaan memiliki risiko kredit yang timbul dari kredit yang diberikan oleh bank, tetapi ada kebijakan untuk memastikan penjualan jasa hanya untuk pelanggan yang dapat dipercaya dengan catatan (*track record*) atau sejarah kredit yang baik.

Merupakan kebijakan Perusahaan bahwa semua pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Selain itu, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko kredit macet. Perusahaan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit yang signifikan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perusahaan menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan mempertahankan kas dan setara kas, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah yang cukup dari komitmen fasilitas kredit.

Perusahaan secara rutin mengevaluasi informasi proyeksi dan aktual arus kas dan terus menilai kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan menjaga komitmen ketersediaan fasilitas kredit.

25. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

	2020	
	US\$ (Nilai penuh)	Jumlah Setara rupiah
Aset		
Kas dan setara kas	1.963.267	27.691.879.706
Liabilitas		
Utang bank	(55.191.723)	(778.479.253.616)
Liabilitas bersih	(53.228.456)	(750.787.373.910)

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2019	
	US\$	Jumlah
	(Nilai penuh)	Setara rupiah
Aset		
Kas dan setara kas	2.728.654	37.931.016.061
Liabilitas		
Utang bank	(20.703.628)	(287.801.129.700)
Liabilitas bersih	(17.974.974)	(249.870.113.639)

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

26. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham No. KP.38/1/18/PI-21.TU tanggal 4 Februari 2021, Perusahaan memutuskan pengangkatan saudara Rafdinal sebagai Direktur Keuangan dan Umum Perusahaan, menggantikan saudara Mokhtar yang diberhentikan sebagai Direktur Keuangan dan Umum.

27. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2021.